

## **STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANJUNGPINANG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR**

Novia Elisabet Simamora<sup>1</sup>, Edison<sup>2</sup>, Imam Yudhi Prastya<sup>3</sup>  
noviaelisabet11@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### **ABSTRACT**

*Disaster issues require a special strategy from the government that is planned and planned using the concept of strategic management. The purpose of the study was to determine the BPBD strategy of Tanjungpinang City in Flood Disaster Management. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The data analysis technique used triangulation technique. BPBD's strategy in flood disaster management uses 4 indicators of the strategic management process from the theory of David Hunger & Thomas Wheelen. The results of this study are seen from the dimensions of environmental observation, external factors have opportunities and threats and internal factors have weaknesses and strengths. Judging from the strategy formulation already has its own mission, strategy and policies. Judging from the implementation of the BPBD strategy in the form of a pre-disaster program carried out by the field of prevention and preparedness, when a disaster occurs it is carried out by the emergency and logistics sector, after a disaster it is carried out by the rehabilitation and reconstruction sector. The evaluation of the strategy carried out by the Tanjungpinang City BPBD in flood disaster management has indeed been carried out but this evaluation has not been carried out optimally. BPBD Tanjungpinang City does not conduct periodic evaluations and only periodically during disasters and annual meetings. In conclusion, the strategy used by the Tanjungpinang City BPBD in flood disaster management has not run optimally because there are still many shortcomings in its implementation*

**Key Word :** Strategy, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Flood

### **I. Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis terletak digaris khatulistiwa, sehingga kondisi topografi wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 18 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan perlu dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasal 2 ayat 2 bahwa penetapan BPBD Provinsi dan BPBD Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 pasal 4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tugas BPBD membantu walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang

penanggulangan bencana. Ayat (2) dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah. b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana.

Serta Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana, dijadikan pedoman dalam menjalankan program, kebijakan, penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis dan terencana. Dalam penanggulangan bencana membutuhkan dana. Dana dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana dalam pasal 1 yaitu dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan atau pasca bencana. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen. Dalam penanggulangan bencana dibutuhkan manajemen strategi yang tepat agar dapat meminimalisir dampak dari suatu bencana. Organisasi publik termasuk pemerintahan mengenal strategi ketika masyarakat mulai mengenal cikal bakal organisasi publik itu sendiri, khususnya negara. Namun demikian secara formal dan dalam sejarah modern boleh dikatakan organisasi publik mengenal strategi sedikit lebih belakang dibandingkan organisasi bisnis, sekitar dasawarsa 1980-an. Perlunya rekayasa politik jika dikehendaki pemerintahan yang memiliki orientasi yang strategis. Bukan tidak mungkin pemerintah memiliki peluang besar meraih keberhasilan, sekalipun memiliki program dan strategi yang ambisius. Ketika pemerintah berhasil memiliki syarat-syarat pendahuluan yang diperlukan, kemungkinan keberhasilan tetap terbuka. Hanya saja syarat-syarat yang diperlukan tampak lebih banyak dan tidak mudah untuk dipenuhi. Sepertinya keberhasilan strategi memerlukan kerja ekstra, yang mungkin justru bisa jadi kerja ekstra luar biasa.

Strategi tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berbasis keuntungan saja, namun juga dibutuhkan oleh organisasi yang bergerak dibidang sosial masyarakat. Strategi memungkinkan dipilihnya tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Strategi dapat mendorong untuk terlebih dahulu membuat perkiraan dan perhitungan mengenai kemungkinan yang akan timbul berdasarkan pengamatan dan analisa terhadap situasi dan kondisi yang ada. Menurut Shahleh dalam Fatimah (2015:20) Strategi yang tepat akan mampu mencapai sasaran-sasaran serta tujuan yang dikehendaki secara maksimal. Menurut David J Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:12) dalam bukunya Manajemen Strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang, menyatakan bahwa strategi manajemen memiliki 4 elemen dasar pokok meliputi: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

Berdasarkan data kejadian banjir BPBD Kota Tanjungpinang terjadi peningkatan titik banjir di Kota Tanjungpinang dimana pada tahun 2016 terjadi 2 kejadian dengan kerugian Rp.300.000.000, tahun 2017 terjadi 2 kejadian, tahun 2018 terjadi 9 kejadian, tahun 2019 terjadi 8 kejadian dengan korban 1 orang meninggal.

*Tabel 1. 1 Data Kejadian Bencana Banjir Tahun 2021 di Kota Tanjungpinang*

No	Wilayah	Jumlah Titik Lokasi	Jumlah Kartu Keluarga Terdampak	Jumlah Rumah Terendam
1.	Kecamatan Tanjungpinang Kota			
	Kelurahan Kampung Bugis	7 titik banjir	-	-
	Kelurahan Penyengat	3 titik banjir	-	-

	Kelurahan Tanjungpinang Kota	4 titik banjir	-	-
	Kelurahan Senggarang	5 titik banjir	-	-
Total	4 Kelurahan	19 titik	-	-
2.	Kecamatan Bukit Bestari			
	Kelurahan Seijang	13 Titik Banjir	30 KK	8 Rumah
	Kelurahan Dompok	4 titik banjir	19 KK	-
	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti	12 titik banjir	140 KK	-
	Kelurahan Tanjungpinang Timur	7 titik banjir	169 KK	-
	Kelurahan Tanjung Unggat	1 titik	-	-
Total	5 Kelurahan	37 titik	358 KK	8 rumah
3.	Kecamatan Tanjungpinang Barat			
	Kelurahan Kamboja	2 titik	-	-
	Kelurahan Tanjungpinang Barat	5 titik	6 KK	-
Total	2 Kelurahan	7 titik	6 KK	-
4.	Kecamatan Tanjungpinang Timur			
	Kampung Bulang	6 titik	-	-
	Melayu Kota Piring	12	230 KK	-
	Air Raja	12 titik	-	-
	Pinang Kencana	14 titik	242 KK	226 rumah
	Batu ix	22 titik	845 KK	815 rumah
Total	4 Kelurahan	54 titik	1.317 KK	1.041 rumah
Jumlah Total	4 Kecamatan 15 Kelurahan	117 titik	1.681 KK	1.049 rumah

Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang

Berdasarkan pasal 4 perda no 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kota Tanjungpinang, (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah.

Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Menurut Ligal dkk, 2008: 162-169).

Untuk kejadian banjir bisa terjadi karena beberapa faktor alam diantaranya, curah hujan yang tinggi, juga bisa terjadi saat pasang air laut tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Pasang yang tinggi dan curah hujan yang tinggi bisa terjadi beriringan sehingga menyebabkan banjir di Kota Tanjungpinang cukup lama. Faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pembangunan pemukiman didaerah resapan air di Kelurahan Sembilan, pembuangan sampah sembarangan, saluran buang air tersumbat. Dengan kondisi yang sedemikian rupa Tanjungpinang merupakan wilayah kepulauan. Banjir yang terjadi dengan luapan yang besar itu disebabkan musim pasang. Sehingga Tanjungpinang memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah misalnya daratan.

Wilayah kepulauan misalnya drainasenya bagus, saluran airnya baik, jika beriringan dengan pasang yang tidak terprediksi luapannya bisa menjadi suatu yang tidak bisa dihindari. Berbeda dengan wilayah daratan yang menjadi masalah gorong-gorongnya, drainase saluran pembuangannya airnya tidak bagus sehingga luapan air dari wilayah dataran tertinggi kedataran rendah tidak tertampung, sehingga meluap. Daerah kepulauan bagaimana drainasenya dibaguskan sedangkan muaranya saja meluap. Kondisi wilayah kepulauan yang seperti ini harus mendapat perhatian dalam hal penanggulangan bencana banjir dengan manajemen strategi.

Sesuai penjelasan fenomena diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir?**. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menjelaskan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir.

## II. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian ini yaitu keterlibatan masyarakat yang terjadi dengan mencari dan menemukan data secara langsung pada responden yang dianggap berkompeten dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:8) mengatakan bahwa : “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) ; disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Penelitian ini dilakukan di BPBD Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Fokus penelitian ini adalah strategi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir yang meliputi proses manajemen strategi. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi literatur. Dan informan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu Sekretaris BPBD Kota Tanjungpinang, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Darurat dan Logistik, Anggota Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:264)), adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

## III. Hasil dan Pembahasan

Untuk dapat mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan indikator dari proses manajemen strategi menurut David Hungaer dan Thomas L Wheelen. Proses manajemen strategi untuk melihat strategi BPBD dalam penanggulangan Bencana. Dalam penanggulangan bencana khususnya banjir membutuhkan strategi, agar BPBD secara terencana menyusun usaha-usaha atau strategi penanggulangan bencana yang terjadi di masyarakat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi

Dalam upaya strategi penanggulangan bencana dengan cara pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian.

### 1. Pengamatan Lingkungan

Tahap pertama dalam manajemen strategi adalah pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan dilakukan berdasarkan pada dimensi eksternal dan internal organisasi yang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*). Dengan pengamatan lingkungan nantinya dapat diketahui gambaran umum dari kondisi/situasi lingkungan organisasi. Mengamati lingkungan adalah tahap dimana terjadi kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengevaluasian serta penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi kepada personal kunci (*key people*) didalam organisasi. Kepala Pelaksana Organisasi perlu menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan. Perjalanan organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan, dan perubahan yang terjadi pada lingkungannya.

Indikator dari pengamatan lingkungan ada peninjauan faktor eksternal. Peninjauan eksternal dilakukan oleh BPBD Kota Tanjungpinang, Dalam hal ini dimensi Pengamatan lingkungan yang perlu dilakukan oleh BPBD Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan bencana banjir dengan melihat faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) yang terdapat di Badan Penanggulangan Bencana, seperti apa yang diungkapkan oleh bapak Hendra selaku Kepala Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan :

*Ketika terjadi banjir dalam skop besar seperti yang terjadi di awal januari 2021 kemarin termasuk banjir yang besar karena terjadi dimana-mana sehingga kita mendapat bantuan dari pemerintah Kota dan melakukan koordinasi dengan Polri, TNI, Tagana, kita juga mendapat bantuan .*

(wawancara pada 1 Juli 2021)

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan terjadi koordinasi dan dukungan dari instansi pemerintah lain yang terkait jika skop terjadinya banjir besar dengan melibatkan Polisi, Tentara, juga ada partisipasi masyarakat Kota Tanjungpinang cinta lingkungan ikut dalam menangani banjir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2016 pasal 41 ayat 3 bagian a&g Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

a. pengerahan sumber daya manusia, meliputi masyarakat seperti : relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki keterampilan, kemandirian, kompetensi, pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

g. Komando untuk memerintahkan instansi /lembaga yang meliputi SAR, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yang bertempat tinggal di tepi laut sudah paham ketika pasang air laut terjadi, dan apa yang harus dilakukan sehingga dapat menyelamatkan barang-barang berharga masyarakat,. Masyarakat dapat melihat waktu pasang kapan surut dan kapan naik.

Beranjak kekonteks berikutnya ancaman yang berada di Kota Tanjungpinang yaitu ditemukan bahwa faktor alam seperti Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan wilayah dengan dataran landai dibagian pantai yang memiliki topografi bervariasi dan bergelombang dan dikelilingi laut. Sebagai wilayah kepulauan saat terjadinya curah hujan yang tinggi beriringan dengan pasang air laut.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yeni selaku Kepala Seksi bidang Kedaruratan dan Logistik:

*“Pada awal januari kemarin penyebab banjir yang terjadi karena pasang yang tinggi beriringan dengan hujan yang lama sehingga air dari laut bisa meluap sehingga menyebabkan genangan atau banjir terbesar di Kota Tanjungpinang. Sehingga banjir yang terjadi menggenangi sepanjang jalan yang mengakibatkan terkendalanya aktivitas masyarakat Kota Tanjungpinang.*

(Wawancara Jumat, 16 Juni 2021)

Dari hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa banjir terjadi pada musim tertentu dimana ketika curah hujan yang beriringan dengan pasang air laut yang tinggi, membuat air hujan mengalir tidak kelaut lagi namun kedaerah dataran rendah yang menyebabkan terjadinya genangan air atau banjir di permukiman yang topografinya dataran rendah dan sepanjang jalan yang landai di Kota Tanjungpinang.

Tidak hanya itu data dukung wilayah menunjukkan Tanjungpinang merupakan wilayah kepulauan dengan Luas laut Kota Tanjungpinang mencapai 107,96 Km<sup>2</sup> atau 45,08% dari luas wilayah administrasi. Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan wilayah dengan dataran landai di bagian pantai, dengan kondisi seperti ini, sewaktu-waktu banjir dapat terjadi kembali di Kota Tanjungpinang. (Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang)

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 29 ayat (3) pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal, dan ayat (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Dimensi Pengamatan Lingkungan selanjutnya dengan melihat faktor internal yang berada di Kantor BPBD Kota Tanjungpinang yaitu dari segi kekuatan yang dimiliki oleh BPBD Kota Tanjungpinang yaitu Tugas Pokok dan Fungsi yang sudah cukup jelas yang diatur dalam Peraturan Daerah secara tertulis yang memudahkan para staf atau anggota dalam melaksanakan pekerjaan karena mereka sudah memiliki wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Kemudian hubungan interaksi yang telah diciptakan oleh pegawai terhadap masyarakat sehingga staf dapat mengetahui apa yang terjadi dilingkungan BPBD Kota Tanjungpinang.

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Andhika selaku sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang:

*“Terkait pelaksanaan tugas kita sudah diatur dalam Peraturan Daerah dan sesuai dengan tupoksi sesuai dengan bidang masing-masing dilakukannya”.*

*(Wawancara pada 5 Juli 2021)*

Dalam pelaksanaan Tugas BPBD Kota Tanjungpinang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang No 22 Tahun 2012 Tentang Uraian dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.

Kekuatan yang dimiliki oleh BPBD Kota Tanjungpinang juga memiliki kelemahan yaitu pertama adanya kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Dimana membuang sampah dapat menyebabkan mampetnya saluran drainase saat terjadinya hujan.



*Gambar 4. 1 Keadaan parit yang penuh dengan sampah*

*Sumber : Olahan Peneliti. 2021*

Dilihat dari gambar 4.4 diatas dapat kita lihat bahwa masih adanya budaya masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga tidak dapat dipungkiri ketika hujan datang dapat menyebabkan mampetnya saluran air.

Wawancara bersama bapak Andika selaku sekretaris BPBD Kota Tanjungpinang kelemahan dalam menanggulangi banjir:

*“Tanjungpinang ini sebutannya bukan banjir namun genangan air karena banjir merupakan bencana yang terjadi berbulan-bulan. Penyebab terjadinya Banjir karena saluran drainase yang mampet sehingga air tidak teraliri dengan baik. Daerah yang resapan air yang berkurang karena air tidak langsung meresap ke tanah karena bangunan yang ada kurang memperhatikan*

*pembuatan resapan air. Kebiasaan masyarakat kita yang suka membuang sampah sampai saat ini masih terjadi, kita sudah sosialisasi, dari bidang PK namun masih saja terjadi”.*

(Wawancara pada Selasa 5 Juli 2021)

Dari pemaparan wawancara diatas disimpulkan bahwa masih adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan seningga sapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyumbatan drainase.

Faktor kelemahan kedua karena kurangnya kualitas sumberdaya manusia terkait penanggulangan bencana, serta ketika terjadinya pergantian struktur menyebabkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan bencana, apalagi jika anggota baru belum memiliki pengalaman dilapangan terkait evakuasi.

Dari hasil analisis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan lingkungan dari eksternal memiliki peluang dan ancaman serta internal memiliki kelemahan dan kekuatan. Sehingga dalam penanggulangan bencana dapat dikatakan berjalan dengan optimal.

## **2. Perumusan Strategi**

Pada Tahap perumusan strategi terjadi serangkaian proses yang terlibat dalam menciptakan atau menentukan strategi dari suatu organisasi. Perumusan strategi dimana tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif strategi yang akan dipilih oleh organisasi. Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi dilakukan oleh unsur pengarah melihat pada misi organisasi, tujuan, strategi, kebijakan.

Dalam penetapan strategi penanggulangan bencana banjir di Kota Tanjungpinang berpedoman pada Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana. Berikut Visi dan Misi BPBD Kota Tanjungpinang dalam upaya penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Tanjungpinang.

Visi BPBD Kota Tanjungpinang : Kota Tanjungpinang yang tangguh dalam menghadapi bencana. Tangguh bermakna bahwa memiliki kecepatan, ketepatan, kekuatan, kemampuan, kecepatan dalam memberikan dalam pelayanan penanggulangan bencana.

Untuk mewujudkan visi BPBD Kota Tanajungpinang dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta meningkatkan kemampuan untuk menanggulangi bencana maka dirumuskan misi. BPBD Kota Tanjungpinang memiliki Misi dimana berisi tentang :

1. Mengembangkan profesional aparaturnya
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi diperlukan kerjasama yang sinergis antar SKPD, Lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan dalam BPBD.

Tujuan BPBD meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana dengan sasaran meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Tujuan penanggulangan bencana BPBD selaras dengan :

Pada pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penangulangan bencana ialah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa, dan bernegara.

Strategi yang dimiliki BPBD Kota Tanjungpinang: diatur dalam Peraturan Daerah :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengembangkan Desa Tangguh bencana.
2. Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasamadengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana.

Strategi yang dimiliki BPBD meningkatkan kelurahan tangguh bencana sudah berjalan, namun belum optimal dikarenakan kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang ada sebanyak 18 Kelurahan, dan kelurahan Tangguh Bencana yang sudah terbentuk baru 2 Kelurahan yaitu berada di Senggarang dan pulau penyengat. (Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang)

Kebijakan yang dimiliki BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana sudah ada sampai pada Peraturan Daerah dimana dapat dijadikan pedoman oleh BPBD Kota Tanjungpinang dalam Menyenggarakan Bencana Daerah. kebijakannya dalam bentuk tulisan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimana dalam Penanggulangan Bencana terdiri dari sebelum bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Perumusan disebut juga perencanaan dimana BPBD membuat perumusan yang spesifik akan dapat menunjukkan tentang gambaran yang lebih fokus mengenai pemecahan masalah yang bersifat umum yang terjadi di lokasi dan kemudian membuat usaha-usaha yang dilakukan BPBD dalam bentuk kerjasama instansi lain maupun masyarakat agar meminimalisir dampak yang diakibatkan banjir tersebut. Perumusan bicara tentang kebutuhan masa depan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berdampak pada masa depan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian strategi selalu saja dimulai dari apa yang dapat terjadi bukan dari apa yang terjadi.

Strategi yang dilakukan BPBD dalam pencegahan bencana banjir di Kota Tanjungpinang dengan melakukan tindakan pra bencana yang didalamnya ada pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian pada saat bencana terjadi yang mana dilakukan upaya kedaruratan dan pendidtribusi logistik. Langkah terakhir yaitu setelah bencana yang memfokuskan pada usaha merehabilitasi dan rekonstruksi dari dampak bencana. Hal ini diharapkan mendapatkan hasil yang baik yaitu meminimalisir resiko/dampak bencana atau bahkan mencegah kejadian bencana.

Mengenai perumusan strategi BPBD Kota Tanjungpinang dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Tanjungpinang mengacu pada visi dan misi dan juga dari pengukuran internal dan eksternal BPBD dalam mengamati kekhasan kota Tanjungpinang yang pada akhirnya suatu strategi dapat dirumuskan. Dengan sasaran untuk menciptakan Kota Tanjungpinang yang tanggap darurat dalam penyelenggaraan bencana. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang membuat strategi BPBD dengan arah strategi bencana untuk mengurangi persoalan bencana banjir yang terjadi. Dalam penanganan banjir di Kota Tanjungpinang, strategi yang dirumuskan terdiri dari 3 tahapan yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam saat pra bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan terbagi menjadi saat ada bencana dan tidak ada bencana. Sedangkan dalam keadaan saat bencana meliputi kedaruratan dan logistik. Kemudian setelah bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **3. Implementasi Strategi**

Setelah kebijakan dibentuk maka tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan yang telah rekomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukan berarti kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Implementasi strategi yaitu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program, karena perubahan datang dari implementasi bukan dari perencanaan. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberi pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam penanggulangan bencana banjir, sumber



daya manusia merupakan faktor penting yang memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi strategi.

Masyarakat Kota Tanjungpinang khususnya yang rumahnya dekat dengan pinggir laut dan tinggal didataran rendah ketika pasang tinggi beriringan dengan curah hujan yang tinggi, merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang saat banjir.

Implementasi strategi sangat dibutuhkan oleh BPBD sehingga program-program penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dibuat oleh BPBD diharapkan bergerak sesuai dengan yang diharapkan dalam strategi kebencanaan khususnya saat bencana banjir.

*Tabel 4. 1 Klarifikasi Tingkat Kerawanan Banjir*

Tingkat Kerawanan Banjir	Nilai Indeks Keabsahan
Tidak Rawan	5.01-7,37
Potensi Rawan	7.37-9.73
Agak Rawan	9.73-12.091
Rawan	12.091-14.451
Sangat Rawan	14.451-16.812

*Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang*



*Gambar 4. 2 Peta Rawan Bencana Kota Tanjungpinang*

*Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang*

Seksi Pencehahan dan Kesiapsiagaan yang berperan dalam pengusulan terkait penanggulangan bencana, mengambil masalah dari masyarakat kemudian dikoordinasi dengan instansi terkait. Pencegahann dan Kesiapsiagaan melakukan koordinasi dengan seluruh kelurahan, dan kecamatan terkait, dan instansi-intansi terkait, lalu dipetakan daerah yang rawan bencana. Jadi setelah terbentuknya peta rawan bencana lalu di koordinasikan dengan instansi terkait, contoh seperti jika terjadi drainase yang kecil melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pembesaran parit yang kecil. Lalu mengusulkan anggaran terkait pembesaran drainase ditambah.



*Gambar 4. 3 Sosialisasi mengenai daerah-daerah rawan bencana*

*Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang*

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan sosialisasi terkait daerah rawan bencana dan sehingga saat terjadi banjir tidak lagi panik namun mengetahui apa yang harus dilakukan seperti saat banjir sudah masuk daerah rumah, secepat mungkin mematikan terlebih dahulu listrik sehingga menghindari terjadinya korslet. Namun sosialisasi terkait daerah rawan bencana tidak berjalan karena anggaran yang tidak berjalan sejak tahun 2019 akibat covid dana dialihkan ke covid 19.



Gambar 4. 4 Titik Kumpul Jalur Evakuasi  
Sumber : Olahan Peneliti 2021

Dengan adanya titik kumpul jalur evakuasi seperti gambar diatas lebih memudahkan dan mempercepat BPBD untuk Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Pada fase saat terjadi bencana banjir, BPBD memiliki tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat adalah tim yang dibentuk untuk merespon dengan segera jika bencana terjadi dengan segera mendatangi tempat kejadian bencana untuk mengevakuasi korban bencana dengan memberikan fungsi kepada instansi lintas sektoral seperti TNI dan POLRI pada saat tanggap darurat jika cangkupan terjadi bencana luas. Prosedur terkait turun lapangan yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat bersifat cepat, akurat, prioritas, dan koordinasi. Di Kota Tanjungpinang masih banyak terdapat kawasan yang rawan genangan air dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 5 Tanggap Darurat yang dilakukan Tim Reaksi Cepat  
Sumber : BPBD Kota Tanjungpinang

Saat bencana terjadi pihak Logistik yang berperan dalam distribusi bahan sandang, pangan dimana bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam penyediaan dapur pengungsian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yeni Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik:

*“Logistik hanya menyalurkan sandang dan pangan seperti sembako langsung kepada masyarakat yang terdampak banjir”*

*(Wawancara Selasa, 12 Juli 2021)*

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa tidak merata dalam pembagian logistik kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dalam penanggulangan banjir masih sangat kurang implementasi yang dilakukan, masyarakat sistemnya menyelamatkan diri sendiri karena, adapun BPBD yang turun ke daerah yang terparah dampak banjir karena Sumber daya yang tidak mumpuni sehingga masyarakat merasakan BPBD hanya menangani bagian yang paling parah saja.

Pada pasca bencana dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang turun dalam penanganan bencana.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Zulfikar selaku staf rehabilitasi dan rekonstruksi

*Bidang kami melakukan Pendataan dari awal, lalu turun kelapangan melakukan survei untuk menghitung kerugian, bukan dalam bentuk mengganti kerugian, tapi bentuk bantuan dalam bentuk uang, hanya saja bantuan tidak langsung cair namun harus melewati prosedur dan butuh waktu.*

*(Wawancara pada rabu 16 Juli 2021 )*

Dikuatkan dengan Wawancara bersama masyarakat dilakukan dengan Bapak Hendra selaku Ketua RW 05 Kelurahan Batu Sembilan:

*Pada pasca banjir saya selaku RW disuruh mendata apa saja kerugian yang masyarakat kami alami*

Implementasi strategi BPBD dalam bentuk program sudah berjalan, hanya saja belum optimal dapat dilihat dari kekurangan personel BPBD Kota Tanjungpinang masih sangat kurang sehingga

dalam implementasi program hanya pada titik terparah saja, yang dikarenakan anggaran yang dimiliki BPBD terbatas. Pada pelaksanaan prosedur penanggulangan bencana menyesuaikan dengan kondisi dilapangan.

#### **4. Evaluasi dan Pengendalian**

Evaluasi strategi yaitu tahap akhir dalam manajemen strategi. Tahap evaluasi dan pengendalian yaitu proses membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan.

Organisasi sangat ingin mengetahui jika strategi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, yang dapat diukur dengan melihat : meninjau ulang faktor internal dimana permasalahan kuantitas dan kualitas personel BPBD masih sangat kurang. Evaluasi internal yang dilakukan dalam bentuk adanya rapat internal setiap kepala seksi dengan anggota bidangnya masing-masing, biasanya dilakukan 3 bulan sekali untuk internal bidang.

Wawancara dengan bapak Andika selaku sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang:

*“Bahwa setiap divisi ada melakukan evaluasi internal setiap bidang, jika ada kendala atau kekurangan baru membuat usulan ke kepala pelaksana melalui sekretaris. BPBD juga sering rapat internal juga mengundang instansi seperti DLH, Perkim, PUPR untuk berkoordinasi terkait bencana yang terjadi”*

*“BPBD sudah menjalankan penyelenggaraan penanggulangan bencana atas 3 tahap yaitu pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana.”*

(Wawancara pada 5 juli 2021)

Strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan dengan cara yang paling baik sekalipun menjadi usang ketika lingkungan eksternal dan internal organisasi berubah. Maka sangat penting bagi penyusun strategi secara sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan strategi. Hal tersebut sejalan dengan strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang yang dalam pengimplementasiannya masih belum optimal sehingga tetap diperlukan langkah evaluasi. Oleh karena kelemahan dari proses strategi yang ada di BPBD Kota Tanjungpinang perlu dilakukan evaluasi agar menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang secara signifikan sebagai langkah korektif. Sangat tidak mungkin untuk menunjukkan bahwa sebuah strategi sudah optimal atau bahkan menjamin satu organisasi akan bekerja dengan sangat baik. Hal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi untuk melihat kemungkinan ada kesalahan.

Dengan adanya evaluasi peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan dalam penanggulangan bencana banjir yang ada disaat dilapangan diketahui dengan begitu dapat diambil kesimpulan akan seperti apa langkah yang diperlukan.

Pada evaluasi strategi yang dilakukan oleh BPBD Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan bencana banjir memang sudah dilakukan namun evaluasi ini belum dilakukan secara maksimal atau secara kelanjutan. BPBD Kota Tanjungpinang tidak melakukan evaluasi secara terus menerus dan periodik hanya pada saat bencana terjadi dan rapat tahunan serta mingguan.

Disamping itu upaya pengukuran dari masyarakat pun belum dilakukan, dalam hal ini masyarakat Kota Tanjungpinang tidak melakukan penilaian untuk kinerja BPBD dalam pelaksanaan strategi yang dibuat. Akibatnya proses menelaah, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan strategi belum dapat dikatakan berjalan secara optimal.

Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak dasar warganya, melindungi warga dari berbagai resiko bencana alam, yang dirasakan dan mampu mengendalikan masalah yang terjadi dilingkungannya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat didaerah Kota Tanjungpinang

## Pembahasan

Di setiap provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota dibentuk BPBD Kabupaten/Kota. BPBD Provinsi/ Kota berada dibawah dan bertanggung jawan kepada Kepala Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang berwenang menanggulangi bencana ditingkat daerah dan diatur dalam peraturan perundang undangan. Unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD Kabupaten/Kota. Unsur pelaksana BPBD Kota dalam pasal 8 dan 9 Peraturan dalam Negeri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pedanggulungan Bencana Daerah, bahwa mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Unsur pelaksana BPBD Kota juga menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana.

Dalam Manajemen Strategi terdapat beberapa proses manajemn strategi yang harus dilakukan. Ini dapat dilihat dari beberapa proses manajemen strategi dalam konteks pada penanggulangan bencana terdapat beberapa indikator dalam penelitian ini :

### 1. Pegamatan Lingkungan

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9) pengamatan lingkungan merupakan tahap dimana terjadi kegiatan pemantauan (*monitoring*) pengevaluasian serta penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan internal organisasi kepada kunci didalam organisasi. Dalam pengamatan lingkungan dilihat dari internal yaitu kekuatan dan kelemahan, eksternal yaitu peluang dan ancaman. Menurut Evi Novianto (2019:18) Pengamatan lingkungan dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dalam organisasi. Lingkungan eksternal diamati dalam rangka apa yang diperlukan oleh lingkungan (peluang) sehingga dijadikan dasar merumuskan strategi dalam rangka melakukan tindakan. Pengamatan lingkungan eksternal juga diperlukan dalam penyusunan strategi untuk menghadapi ancaman atau tantangan. Analisis lingkungan internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan tujuan memanfaatkan peluang yang ada sambil menghindari ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan eksternal.

### 2. Perumusan strategi

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:12) perumusan strategi yaitu tahap dimana terjadi serangkaian proses yang terlibat dalam menciptakan atau menentukan strategi dari suatu organisasi. Dalam organisasi BPBD Kota Tanjungpinang sudah terdapat misi, strategi, kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut Evi Novianto (2019:36) bahwa dalam perumusan strategimerupakan aktivitas penyusunan langkah-langkah organisasi dimasa mendatang dengan membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Menetapkan tujuan strategis dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuanstrategis yang telah ditetapkan. Bukti dari perumusan strategi terdapat dalam peraturan dimana yang dalam westite yang sudah disediakan. BPBD juga mengumngkapakan terkait susunan kepengurusan, strategi organisasi. Visi menurut Sumidjo dalam Moh Amin visi merupakan penegasan masa depan dalam kurun waktu tertentu yang hendak dicapai. Sedangkan misi menurut Akdon dalam Moh Amin 2016 misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, rancangan tindakan dengan berbagai indikatornya dalam mengarahkan, merencanakan dan menetapkan program dan rencana tindakan dari organisasi.

Dalam menunjang indikator perumusan strategi maka perumusan strategi merupakan salah satu syarat penting dalam proses manajemen strategi terutama pada proses pra bencana. Perumusan strategi sangatlah diperlukan hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasal 5 bahwa BPBD Kota mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat tepat, efektif dan efisien.

### 3. Implementasi strategi

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:17) implementasi strategi dimana terjadi pengimplementasian dari strategi dan kebijakan yang telah dibuat. Dalam implementasi terkait program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dimana masih terdapat kekurangan yaitu kekurangan personel BPBD Kota Tanjungpinang. Menurut David Fred (2004:18) implementasi strategi adalah mengelola kekuatan selama tindakan dijalankan dengan berfokus pada efisiensi serta membutuhkan motivasi dan keahlian kepemimpinan serta membutuhkan koordinasi dari banyak individu.

### 4. Evaluasi dan pengendalian

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9) evaluasi dan pengendalian dimana terjadi proses membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh. Terjadinya evaluasi dilingkungan setiap seksi dimana terjadi setiap 3 bulan sekali. Menurut usury dan Hammer dalam Evi Novianto (2019:78) bahwa pengendalian merupakan upaya sistematis dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal kemudian melakukan perbaikan terhadap perbedaan yang terjadi. Sedangkan Robert Antony dalam Evi Novianto (2019:78) mengatakan pengendalian manajemen sebagai proses untuk memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Ketidakefektifan indikator dari manajemen strategi yang ditemukan oleh peneliti, berbeda dengan ketidakefektifan yang ditemukan oleh peneliti Tiwi Chandya dalam penelitiannya tentang "Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ketapang". Adapun yang menjadi ketidakefektifannya karena masih terlihat dari sekat kanal yang rusak sehingga mengurangi fungsi dari alat tersebut menjadi optimal kemudian pengadaan sosialisasi yang belum rutin dan berkelanjutan hal ini mengakibatkan penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya, evaluasi sudah dilaksanakan namun belum optimal terlihat dari pernyataan beberapa kalangan yang merasa kurang optimalnya kinerja dari BPBD. Selanjutnya ketidakefektifan yang ditemukan dalam penelitian Dwi Harvikayani dimana dalam terdapat faktor penghambat terdapat dua faktor yaitu faktor pertama kondisi iklim sangat panas membuat resiko kebakaran akan semakin tinggi membuat beberapa lahan kering. Perilaku manusia membuka lahan dengan membakar lahan.

Dari masing-masing penelitian memiliki faktor penghambat yang berbeda-beda. Sehingga hal ini perlu untuk diminimalisir agar pelaksanaan manajemen strategi dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan kesepakatan bersama.

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penjelasan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan peneliti mengenai strategi yang dimiliki BPBD Kota Tanjungpinang adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengembangkan desa tangguh bencana; meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana. Strategi yang dimiliki oleh BPBD Kota Tanjungpinang sudah pada tahap pra bencana. Dari bentuk manajemen strategi yang ada BPBD Kota Tanjungpinang masuk ke dalam strategi fungsional dimana berorientasi dengan fungsi-fungsi kegiatan manajemen yaitu strategi organisasi sudah dimiliki.

Penerapan manajemen strategi dalam tahap penanggulangan bencana terdapat 2 indikator yang sudah berjalan optimal seperti pengamatan lingkungan dan perumusan masalah, dan 2 indikator yang belum berjalan optimal seperti implementasi strategi dan evaluasi pengendalian. Kesimpulan

mengenai Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang dalam Penanggulangan bencana Banjir sebagai berikut:

1. Pada indikator pengamatan lingkungan, faktor eksternal dimana terdapat peluang (*opportunities*) dari penanggulangan bencana dapat memudahkan masyarakat untuk lebih tanggap terhadap tanda-tanda terjadinya banjir. BPBD mendapatkan kemudahan dengan adanya prinsip koordinasi dan keterpaduan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga lebih cepat tepat dalam proses evakuasi korban bencana. Ancaman anggaran yang tersedia terbatas dimana Pemerintah hanya menyediakan dana siap pakai 1% dari total APBD yang digunakan untuk penanggulangan bencana, namun dana siap pakai hanya tersedia pada saat tanggap darurat. Pada faktor internal terdapat kekuatan (*Strength*) dari tugas pokok dan tugas fungsi yang sudah cukup jelas serta pembagian struktur yang diatur secara tertulis saran dan prasarana dapat dikatakan optimal. Kelemahan (*weaknesses*) yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia dan masih ada kebiasaan masyarakat membuang sampah.
2. Dari segi perumusan strategi, BPBD sudah memiliki misi, tujuan, strategi, kebijakan, namun belum memiliki strategi khusus penanganan banjir. Koordinasi dengan instansi lain ketika bencana besar terjadi telah diatur dalam Perda. Dalam merumuskan strategi sendiri BPBD sudah melaksanakan tugas pokoknya dan sudah diatur secara tertulis.
3. Pada indikator Implementasi strategi, berjalan namun dari segi anggaran kurang karena bpbd memiliki anggaran dari APBD 1% dari APBD yang digunakan. Dari segi sumber daya manusia kekurangan jumlah personel. dari segi program, belum ada program khusus penanganan banjir
4. Evaluasi dan pengendalian, evaluasi dilihat dari hasil lapangan dan membutuhkan proses yang panjang. Evaluasi yang dilakukan BPBD belum optimal karena belum dilakukan secara terus menerus atau periodik.

Dari analisis yang dilakukan perindikator maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang digunakan oleh pihak BPBD Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan bencana banjir belum berjalan dengan optimal karena masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan :

1. Pengamatan Lingkungan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan seharusnya mengusulkan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang untuk membangun/menyediakan bak sampah di setiap daerah yang rawan terhadap banjir.
2. Perumusan strategi, seharusnya BPBD mengusulkan strategi khusus penanggulangan bencana banjir karena kota tanjungpinang merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan penanganan banjir pasang air laut.
3. Implementasi strategi, dilakukan penambahan sumber daya atau personel atau anggota sehingga ketika terjadi kembali bencana banjir dapat menjalankan prinsip cepat tepat sesuai sasaran banjir seperti sandang, pangan sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial
4. Melakukan Evaluasi rutin baik dilingkungan organisasi BPBD maupun dengan pihak pihak yang ikut bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan usulan anggaran sehingga dapat melakukan pelatihan semua bidang; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi BPBD Kota Tanjungpinang.
6. Pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi jaringan dengan memanfaatkan aplikasi, seperti sistem berbasis IoT dan jejaring sosial Twitter, informasi terkait resiko kebencanaan dapat diperoleh, diproses, dan disebarluaskan kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.
7. Membuat bangunan pantai (tembok laut) yang mampu mencegah gelombang pasang agar tidak sampai ke darat, membangun rumah pompa yang mampu meminimalisir dampak banjir rob,

dengan cara kerja ketika banjir rob terjadi dimana volume air laut meningkat maka rumah pompa akan menyedot air laut dan dimasukkan kedalam penampungan sementara. Ketika laut sudah surut air akan dibuang kembali kelaut.

#### **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada pihak BPBD Kota Tanjungpinang yang telah memberi dukungan mendapatkan data. Penulis juga menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Edison, S.AP., M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Imam Yudhi Prastya S.IP., MPA selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini

#### **VI. DAFTAR REFERENSI**

##### **Buku :**

- Fatimah, Siti. 2015. *Strategi Pengembangan Obyek Dayat Tarik Wisata Religi*. Semarang. Universitas Islam Negeri Wali Songo.
- Hunger, David J dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. Andi.
- Novianto, Efri. 2019. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta. CV Budi Utama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. PT Alfabeta.
- David, Fred R, 2004. *Manajemen Strategis Konsep-Konsep*. Jakarta. Salemba Empat.

##### **Jurnal :**

- Gunawan Sebastian, Ligal. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir Vol. 8 No 2 Juli 2008, Hal 162-169
- Moh Amin. 2016. Implementasi Manajemen Strategi Kepala Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Serang Vol 2 No 2 Julii 2016. Hal 42-57
- Tiwi Chandra. 2021. Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Ketapang. Vol 4 No 1 April 2021. Hal 97-103

##### **Undang -Undang:**

- Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana

##### **Lainnya:**

BPBD Kota Tanjungpinang